

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam praktik bisnis, teori keagenan digunakan sebagai landasan yang terjadi selama ini. Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya keterikatan kontrak kerja antara pihak pemberi modal (*principal*) dengan manajer (*agent*). *Principal* sebagai pihak yang memberikan modal akan memberikan dana dan fasilitas kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan dengan harapan *agent* tersebut dapat mendapatkan *return* yang tinggi dari dana yang telah diinvestasikan. Sedangkan *agent*, apabila keputusan yang diambil oleh *agent* dengan tujuan untuk memuaskan kepentingannya sendiri malah tidak mensejahterakan pemegang saham (Kiswara, 1999 dalam Setyarini, 2011). Teori keagenan ini berpendapat bahwa pihak *principal* maupun pihak *agent* bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

Jika *principal* dan *agent* saling mengutamakan kepentingannya sendiri, maka akan muncul terjadinya konflik. Konflik yang sering muncul adalah terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi yang terjadi akibat tidak

meratanya informasi atau dengan kata lain adanya kesenjangan dalam menyampaikan informasi kepada pihak *principal* maupun *agent*.

Terjadi kesulitan *principal* dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap *agent* yang disebabkan karena asimetri informasi dapat menimbulkan masalah. Jensen dan Meckling (1976) dalam Pratika (2011) menyatakan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kesepakatan kerja.
- 2) *Adverse Selection*, suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui secara pasti apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena kelalaian dalam tugas.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Salah satu teori yang dapat melatarbelakangi masalah asimetri informasi dalam pasar adalah *signalling theory* (Andarini dan Januarti, 2010). Asimetri informasi merupakan ketimpangan informasi yang diterima oleh pihak eksternal dari pihak manajer. *Signalling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan (Wahyuni, 2012).

Informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal melalui manajer mengenai kinerja merupakan sinyal bagi pihak eksternal. Kualitas sinyal yang diberikan oleh manajer berpengaruh terhadap kualitas keputusan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk mengurangi asimetris informasi yang akan terjadi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan (Setyarini, 2011).

Selain itu, *signalling theory* juga menjelaskan bahwa perusahaan yang membentuk RMC sebagai komite yang berfungsi untuk mengawasi dan memperhatikan risiko merupakan wujud komitmennya untuk menuju praktik *good corporate governance* dengan harapan mendapat citra yang baik oleh publik. Namun, tidak ada suatu kewajiban untuk perusahaan membentuk RMC (Subramaniam *et al.*, 2009).

3. Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang sedang terjadi atau kejadian dimasa datang karena suatu proses yang dilakukan. Terjadinya risiko pun tidak dapat dipastikan. Namun, adanya pengelolaan risiko oleh manajemen risiko dapat meminimalisir terjadinya risiko. Djojosoedarso (2003) dalam Pratika (2011), menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan

risiko, termasuk risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat.

Untuk menentukan tindakan yang tepat pada saat terjadinya risiko maka dibutuhkan adanya pendekatan secara sistematis yang dilakukan oleh manajemen risiko. Pengelolaan risiko yang tepat dapat menghindarkan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan (Kuncoro, 2013). Kerangka atau langkah kerja manajemen risiko yang diungkapkan oleh Batuparan (BEI news Edisi 5 tahun 11, maret-april 2011) dalam Pratika 2011) adalah:

1) Identifikasi Risiko

Proses pengenalan yang dilakukan secara cermat terhadap unsur yang membentuk risiko dan risiko bawaan dari suatu perbuatan yang dilakukan dan kemudian dilakukan pengukuran dan pengelolaan risiko merupakan bagian dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal pada proses manajemen risiko.

2) Pengukuran Risiko

Untuk dapat memahami akibat dari risiko yang terjadi, maka dilakukan proses pengukuran risiko terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan dalam memahami akibat dari risiko tersebut merupakan petunjuk awal untuk manajemen risiko dalam mengambil tindakan yang tepat.

3) Pengelolaan Risiko

Untuk memperkecil terjadinya risiko, maka dilakukan pengelolaan risiko agar tingkat risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tidak melebihi batas dan masih dapat diterima. Pengelolaan risiko bergantung pada hasil pengukuran risiko.

4. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

FCGI (2002) dalam Wulandari (2012) menyebutkan bahwa pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan terdapat pada dewan komisaris. Dewan komisaris membentuk tiga komite yang bertugas sebagai pengawasan dalam perusahaan. Namun, adanya keraguan dewan komisaris dalam memberikan tanggung jawab kepada komite audit untuk mengelola risiko, yang disebabkan karena luasnya tanggung jawab yang dibebankan dan ketidakefektifan kinerja komite audit serta perkembangan perusahaan yang semakin luas menyebabkan terjadinya kompleksitas dan tingginya risiko yang akan dihadapi perusahaan maka dewan komisaris berinisiatif untuk membentuk suatu komite yang secara khusus memperhatikan dan memberikan strategi yang tepat terhadap risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Komite tersebut adalah komite manajemen risiko (RMC).

PMK No. 191/PMK.09/2008 menjelaskan bahwa komite manajemen risiko merupakan suatu komite yang memiliki fungsi untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan dan untuk mengevaluasi kinerja. Selain itu, adanya keberadaan *risk management committee*(RMC) juga untuk meringankan tugas dan fungsi dewan komisaris (Kuncoro, 2013).

Di Indonesia, peraturan untuk membentuk suatu komite manajemen risiko diwajibkan pada perusahaan perbankan. Hal ini tertuang pada peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang menjelaskan bahwa salah satu cara untuk merealisasikan *good corporate governance* adalah dengan pembentukan komite yang khusus bertugas memantau risiko.

RMC terdiri dari dua macam, yakni RMC yang berdiri sendiri dan RMC yang keberadaannya tergabung dalam komite audit (SRMC). Namun, fungsi dan tugasnya sama yakni memantau, mengelola dan memberikan strategi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya komite yang khusus menangani risiko yakni RMC maka akan memberikan kemudahan dalam mengendalikan perusahaan secara keseluruhan (Subramaniam *et al.*, 2009). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai membentuk RMC sebagai salah satu komite terpenting bagi keberlangsungan perusahaan.

5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Untuk dapat mengawasi jalannya perusahaan secara optimal dibutuhkan proses monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Selain itu, untuk menciptakan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh lain dan menjaga independensi dalam pengambilan keputusan serta kebijakan maka dibutuhkan dewan komisaris independen agar tidak memihak pada kepentingan dewan direksi (Syakhroza, 2004 dalam Kuncoro, 2013). Hal ini dilakukan untuk menjaga karakteristik independendan menghindari terjadinya afiliasi. Afiliasi merupakan adanya hubungan bisnis atau lainnya yang terdapat antar pihak sehingga dapat mengenyampingkan kepentingan pemegang saham, kreditor dan lainnya demi kepentingan pribadi.

Hadirnya dewan komisaris independen juga dituntut untuk dapat memberikan nasihat atau arahan kepada dewan direksi terkait dengan jalannya perusahaan. Banyaknya jumlah dewan komisaris independen yang ada merupakan salah satu cara optimal yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Yatim (2009) menyatakan tingginya tingkat proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk

dilakukannya pengawasan yang lebih tinggi pada aktivitas manajemen risiko.

Keputusan dewan Direksi PT Bursa Efek Jakarta yang tertuang pada Pencatatan Efek No 1- A No : Kep-305/BEJ/07-2004 menegaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI secara proporsional memiliki jumlah dewan komisaris independen yang berbanding lurus dengan jumlah saham yang dikuasai diluar pemegang saham, yakni sebesar 30% dari total dewan komisaris.

6. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris berhubungan dengan keberadaan RMC pada suatu perusahaan. Semakin kompleksitas sebuah perusahaan, maka semakin tinggi sebuah risiko. Untuk itu perusahaan harus menjaga keefektifan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu tertuang pada pedoman umum penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia bahwasannya tingkat kompleksitas sebuah perusahaan harus sebanding dengan ukuran atau jumlah anggota dewan komisaris.

Tingkat keefektifan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi banyaknya jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini karena menunjukkan dampak yang berbeda. Dampak positif yang timbul adalah tingginya ukuran dewan akan dapat memberikan sumber daya yang tinggi pula untuk dewan

komisaris (Subramaniam *et al.*, 2009). Selain itu, semakin tinggi ukuran dewan, maka mempermudah perusahaan dalam mengatasi ancaman yang terdapat pada risiko yang terjadi pada perusahaan karena banyaknya anggota yang ikut memperhatikan dan memberikan pendapat (Muntoro, 2006 dalam Kusuma 2012).

Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah munculnya masalah agensi. Hal ini karena pemisahan antara manajemen dan kontrol sehingga dapat mengganggu kemampuan dewan dalam mengendalikan manajemen dalam mengkomunikasi dan koordinasi (Wardhani, 2006). Selain itu, perbedaan jumlah anggota dewan komisaris pada setiap perusahaan yang tidak sama juga berhubungan dalam tingkat pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan harus lebih banyak atau setara dengan jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini untuk mencegah adanya tekanan psikologi yang dialami dewan komisaris karena perbedaan pendapat dengan dewan direksi (Indrayati, 2010).

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antar dewan komisaris maka dilakukan kegiatan rapat dewan komisaris dengan para manajer dan fungsi pengendalian lainnya untuk saling bertukar informasi. Melalui kegiatan rapat yang diadakan

juga dapat memberikan informasi kepada dewan komisaris tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya secara seimbang.

Tingginya frekuensi rapat yang dilakukan pada suatu perusahaan dalam satu periode dapat meningkatkan kualitas audit eksternal serta meminimalkan insiden masalah pada pelaporan keuangan (Dezoort *et al.*, 2002 dalam Sutaryo *et al.*, 2011). Selain itu, untuk dapat menghasilkan pengawasan yang baik maka anggota akan meminta secara tidak langsung kepada dewan komisaris untuk melakukan rapat lebih sering guna meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen (Setyarini, 2011). Jumlah frekuensi rapat dapat dilihat melalui kualitas keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan semakin rendah frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu periode maka akan berdampak pada kurangnya pemahaman dewan dalam mengenali risiko yang akan terjadi (Kuncoro, 2013). Oleh sebab itu, dewan komisaris membutuhkan RMC sebagai komite yang khusus memberikan perhatian terhadap risiko yang mungkin terjadi.

8. Reputasi Auditor

Selain dibutuhkan dewan komisaris independen yang berasal dari luar, perusahaan juga membutuhkan auditor sebagai pengawas atas risiko kecurangan yang mungkin terjadi. Hal ini berpengaruh terhadap reputasi auditor dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Data yang dihasilkan oleh auditor yang memiliki reputasi tinggi tentunya akan memberikan kepercayaan terhadap pemakai laporan keuangan.

Reputasi auditor dapat dilihat pada pemakaian KAP yang terdapat pada kelompok *big four*. Pemakaian auditor yang terdapat pada kelompok *big four* dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengendalian eksternal (Cohen *et al.*, 2004). Selain itu, dengan menggunakan auditor yang berasal dari *big four* yang memiliki kecenderungan hubungan baik dengan klien juga dapat meningkatkan kualitas praktik yang baik (Subramaniam *et al.*, 2009).

9. Kompleksitas

Segmen bisnis suatu perusahaan memiliki dampak pada kompleksitas perusahaan. Hal serupa juga dikatakan oleh Subramaniam *et al.*, (2009) yang berpendapat bahwa semakin banyak segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan maka berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas. Jika kompleksitas bisnis yang terdapat pada perusahaan itu tinggi,

maka risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga semakin tinggi (Setyarini, 2011). Salah satu yang menyebabkan perusahaan yang mempunyai risiko tinggi berkemungkinan juga memiliki jumlah segmen bisnis yang banyak.

10. Risiko pelaporan keuangan

Terdorongnya perusahaan untuk membentuk RMC salah satunya yakni karena untuk mengawasi terjadinya risiko pelaporan keuangan. Risiko pelaporan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu perusahaan yang memiliki tingkat aset pada piutang usaha yang besar sehingga terjadinya ketidakpastian data akuntansi yang tinggi menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pengawasan risiko yang muncul (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, (2009).

Selain itu, tingginya tingkat proporsi aset pada piutang usaha juga menimbulkan risiko piutang yang tak tertagih. Persediaan perusahaan yang berlebihan pun juga berisiko terjadinya barang rusak, pencurian dan usam (Kuncoro, 2013).

11. Leverage

Sebuah perusahaan yang memiliki utang jangka panjang akan berdampak terhadap risiko keuangan. Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan hutang maka digunakan rasio *leverage* (Setyarini, 2011). Tingginya rasio

leverage pada suatu perusahaan dapat meningkatkan terjadinya risiko *going concern* pula (Subramaniam *et al.*, 2009).

Tinggi rendahnya tingkat rasio *leverage* pada perusahaan memiliki dampak yang berbeda. Jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki risiko keuangan yang tinggi, hal ini disebabkan karena besarnya biaya yang didanai oleh hutang yang kemudian berdampak pada risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Namun, jika tingkat *leverage* perusahaan itu rendah maka akan memperkecil risiko gagal bayar dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan (Setyarini, 2011).

12. Ukuran Perusahaan

Secara umum, untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya jumlah karyawan yang terdapat pada perusahaan, total aset serta total penjualan (Nico, 2010 dalam Dyaksa, 2012). Besaran sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat terlihat dari total aset. Hal ini karena untuk menghasilkan laba maka perusahaan membutuhkan sumberdaya dalam kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin besar jumlah sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Setyarini, 2011). Dengan penggunaan aset yang tinggi maka hal tersebut juga dapat memicu terjadinya risiko bisnis.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Keberadaan RMC

RMC adalah komite baru yang dibentuk oleh dewan komisaris yang dipengaruhi oleh ukuran dewan. Hal ini berkaitan dengan kesempatan yang diberikan untuk mencari SDM lebih yang ditujukan untuk manajemen risiko (Subramaniam *et al.*, 2009). Ukuran dewan juga memiliki dampak positif yang beragam. Dampak positif yang ditimbulkan oleh ukuran dewan komisaris yang tinggi mempermudah perusahaan dalam mengatasi ancaman yang terdapat pada risiko yang terjadi pada perusahaan karena banyaknya anggota yang ikut memperhatikan dan memberikan pendapat (Muntoro, 2006 dalam Kusuma 2012).

Selain itu, agar dapat mengelolah sumber daya dengan baik, maka perusahaan dapat menggunakan peran dewan komisaris (Kuncoro, 2013). Oleh sebab itu, maka untuk dapat mengawasi serta memperhatikan risiko yang mungkin terjadi serta meningkatkan sumber daya yang diberikan, maka dibutuhkan komite RMC bagi perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang tinggi.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap hubungan ukuran dewan komisaris terhadap keberadaan RMC adalah Subramaniam *et al.*, (2009) dan Chen *et al.*, (2009) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratika (2011) dan Andarini dan Januarti (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Dengan demikian, hipotesis yang turunkan adalah:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Keberadaan RMC

Fungsi pengawasan tertinggi terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi serta terjadinya afiliasi. Tingginya tingkat proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih tinggi pada aktivitas manajemen risiko Yatim (2009). Selain itu, untuk menciptakan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh lain dan menjaga independensi dalam pengambilan keputusan serta kebijakan maka dibutuhkan dewan komisaris independen agar tidak memihak pada kepentingan dewan direksi (Syakhroza, 2004 dalam Kuncoro, 2013).

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan dan perhatian yang diberikan pada kegiatan perusahaan terhadap kemungkinan-

kemungkinan risiko yang akan terjadi. Untuk dapat memberikan perhatian khusus dan pengawasan terhadap risiko yang muncul tersebut maka perusahaan akan membentuk suatu komite RMC yang independen.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC, seperti penelitian yang dilakukan oleh Chenn *et al.*, (2009), pratika (2011) dan Subramaniam *et al.*, (2009). Namun hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pembentukan RMC. Dengan demikian, hipotesis yang diturunkan adalah:

H2 : Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

3. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Keberadaan RMC

Rapat merupakan suatu kegiatan berguna untuk dapat memperoleh informasi secara seimbang, relevan dan jelas. Fungsi rapat yang dilakukan adalah untuk saling bertukar informasi mengenai keputusan, kebijakan maupun keadaan perusahaan yang sebenarnya. Tingginya frekuensi rapat dewan komisaris dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik (Setyarini, 2012). Selain itu, tingginya frekuensi rapat yang

dilakukan dalam satu periode maka akan meningkatkan kualitas audit eksternal serta meminimalkan insiden masalah pada pelaporan keuangan (Dezoort *et al.*, 2002 dalam Sutaryo *et al.*, 2011).

Jika jumlah frekuensi rapat dewan komisaris menunjukkan hasil yang kecil, maka ini dapat berdampak kurangnya dewan komisaris dalam mendapatkan informasi mengenai risiko yang berpotensi terjadi pada perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan dewan komisaris akan cenderung membentuk suatu komite RMC yang dapat mengawasi serta memberikan strategi mengenai peluang terjadinya risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini (2011) menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2013) yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki hubungan terhadap keberadaan RMC. Dengan demikian maka hipotesis yang diturunkan adalah:

H3 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

4. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Keberadaan RMC

Agar semakin memperkecil risiko yang dapat terjadi maka perusahaan membutuhkan auditor sebagai pengawas yang berasal dari

luar dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Hasil kinerja yang berasal dari auditor yang memiliki reputasi baik yang berupa data akuntansi akan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan investor (Praptitorini dan Januarti, 2007 dalam Pratika 2011).

Dengan menggunakan KAP yang berasal dari kelompok *big four* maka auditor tersebut digolongkan sebagai auditor yang memiliki reputasi baik. Pemakaian KAP yang termasuk dalam kategori kelompok *big four* akan membimbing kliennya dalam meningkatkan kualitas pengendalian (Cohen *et al.*, 2004). Selain itu, mereka juga dituntut untuk memelihara kualitas audit dan melindungi reputasi KAP *big four* dari kegagalan yang menyebabkan rusaknya reputasi (Subramaniam *et al.*, 2009). Hal tersebut terdukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Yatim (2009) yang menyatakan bahwa pembentukan RMC cenderung dibentuk oleh perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *big four*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.*, (2009), Pratika (2011), dan Setyarini (2011) menemukan hal yang sama yakni reputasi auditor berpengaruh terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et al.*, (2009), Andraini dan Januarti (2012) menemukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Dengan demikian hipotesis yang diturunkan adalah:

H4 : Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

5. Pengaruh Kompleksitas Bisnis Terhadap Keberadaan RMC

Segmen bisnis suatu perusahaan memiliki dampak pada kompleksitas perusahaan. Hal serupa juga dikatakan oleh Subramaniam *et al.*, (2009) yang berpendapat bahwa semakin banyak segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan maka berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas. Jika kompleksitas bisnis yang terdapat pada perusahaan itu tinggi, maka risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga semakin tinggi (Setyarini, 2011). Salah satu yang menyebabkan perusahaan yang mempunyai risiko tinggi berkemungkinan memiliki banyak jumlah segmen bisnis. Munculnya kesadaran karena memiliki segmen bisnis yang besar dan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko, maka perusahaan berinisiatif untuk membentuk komite RMC yang dapat mengawasi dan memperhatikan secara efektif terhadap risiko yang muncul dari kompleksitas bisnis perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yatim (2009) ditemukan bahwa kompleksitas bisnis berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Perusahaan yang memiliki segmen bisnis yang banyak maka akan memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan yang tinggi untuk dapat memberikan strategi

terhadap risiko yang muncul. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et al.*, (2009), Pratika (2011), Andraini dan Januarti (2010), serta Setyarini (2011) menemukan hasil yang bertentangan bahwa kompleksitas bisnis tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Dengan demikian hipotesis yang diturunkan adalah:

H5 : kompleksitas bisnis berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

6. Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan Terhadap Keberadaan RMC

Besarnya jumlah aset yang terdapat dalam piutang, persediaan dapat memicu terjadinya risiko yang tinggi pada tingkat pelaporan keuangan (Subramaniam *et al.*, 2009). Perusahaan yang memiliki tingkat aset pada piutang usaha yang besar menyebabkan terjadinya ketidakpastian data akuntansi yang tinggi sehingga perusahaan harus meningkatkan pengawasan risiko yang muncul (Koroses dan Horvat, (2005) dalam Subramaniam *et al.*, (2009). Selain itu, hal lain yang dapat meningkatkan risiko pelaporan keuangan adalah meningkatnya risiko piutang yang tak tertagih dan banyaknya barang yang rusak, usam serta dicuri (Kuncoro, 2013). Inilah yang menyebabkan perusahaan akan cenderung membentuk suatu komite khusus (RMC) mengawasi dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko yang akan muncul.

Penelitian yang dilakukan penelitiannya Dyaksa (2012) menemukan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andraini & Januarti (2010), Setyarini (2011), Subramaniam *et al.*, (2009), dan Pratika (2011) yang menemukan bahwa keberadaan RMC tidak dipengaruhi oleh risiko pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diturunkan adalah:

H6 : Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC

7. Pengaruh *Leverage* Terhadap Keberadaan RMC

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam menggunakan hutang maka digunakan rasio *leverage* (Setyarini, 2011). Tinggi rendahnya tingkat rasio *leverage* pada perusahaan memiliki dampak yang berbeda. Tingginya rasio *leverage* pada suatu perusahaan dapat meningkatkan terjadinya risiko *going concern* (Subramaniam *et al.*, 2009). Selain itu, perusahaan juga akan memiliki risiko keuangan yang tinggi, hal ini disebabkan karena besarnya biaya yang didanai oleh hutang yang kemudian berdampak pada risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Namun, jika tingkat *leverage* perusahaan itu rendah maka akan memperkecil risiko gagal bayar dalam

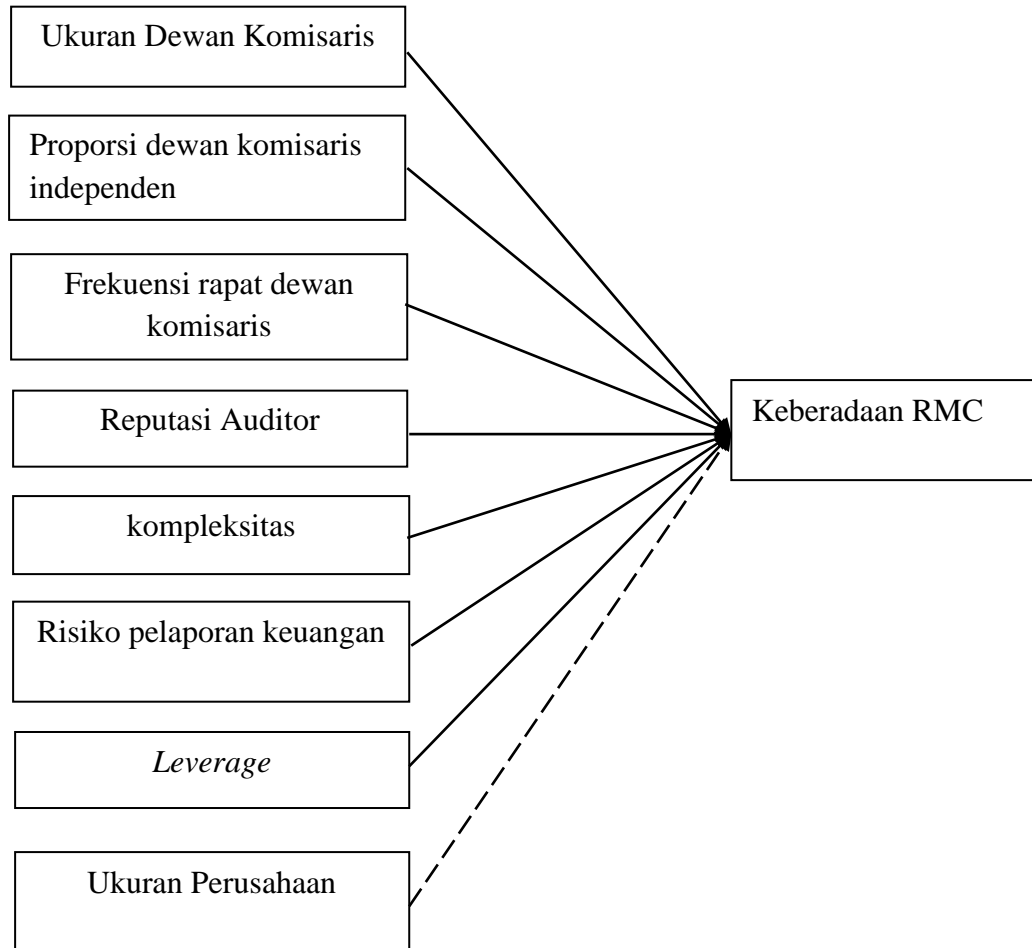
pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan (Setyarini, 2011). Oleh sebab itu, perusahaan menjadikan pembentukan RMC sebagai suatu komite yang dapat mengawasi risiko yang mungkin terjadi secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et. al.*, (2009) menemukan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010). Dengan demikian hipotesis yang diturunkan adalah:

H7 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan

RMC

C. Model Penelitian



Ket:

————— : Variabel Independen

- - - - - : Variabel Kontrol

Gambar2.1

Model Penelitian